



MENGGUGAT SISTEM DEMOKRASI DAN POLITIK DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF TEOLOGI POLITIK JURGEN MOLTmann

Roni^{1*}, Yosbekasa²

Institut Agama Kristen Negeri Toraja^{1,2}

¹roni081190@gmail.com

Abstract: This article discusses the democratic and political system in Indonesia, which is not free from challenges such as corruption, money politics, human rights violations, and various other obstacles. These conditions indicate that Indonesian democracy has not reached its final stage. Various individuals and political elites, using the legitimacy of power, tarnish the democratic system in Indonesia, giving rise to various criticisms from democracy advocates to this day. Through this writing, the author attempts to examine the Indonesian democratic system through the lens of Jurgen Moltmann's political theology in Indonesia. This research uses a qualitative literature study approach to describe Moltmann's views regarding political theology within the democratic system in Indonesia.

Keywords: Democracy, Jurgen Moltmann, politics, theology

Abstrak: Artikel ini membahas sistem demokrasi dan politik di Indonesia yang tidak terbebas dari tantangan, seperti korupsi, money politik, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan berbagai macam tantangan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sampai pada tahapan final. Berbagai macam oknum dan elit-elit politik dengan legitimasi kekuasaan mencoreng sistem demokrasi di Indonesia, sehingga timbul berbagai macam kritik dari pejuang demokrasi hingga saat ini. Melalui tulisan ini, penulis mencoba membaca sistem demokrasi Indonesia melalui lensa teologi politik Jurgen Moltmann di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kepustakaan, untuk menguraikan bagaimana pandangan Moltmann terkait teologi politik dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Demokrasi, Jurgen Moltmann, politik, teologi

Article
History:

Received: 28-11-2024

Revised: 28-12-2024

Accepted: 31-12-2024

1. Pendahuluan

Esensi dari sebuah negara ideal terletak pada realisasi kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan sebagai tujuan inheren bagi seluruh warga negara.¹ Republik Indonesia, yang mendasarkan diri pada sistem demokrasi sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, turut mengadopsi aspirasi ideal tersebut. Dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan kenegaraan ini, ranah politik memegang peranan krusial dalam mengarahkan dan menata dinamika bernegara, organisasi

¹Hendra Setiawan, "Negara Ideal Menurut John Stuart Mill Dan Relevansinya Dalam Politik Indonesia Kontemporer" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2024), 4.

maupun kelompok masyarakat. Politik, dalam konteks ini, dipahami sebagai sebuah mekanisme untuk mengoptimalkan tatanan kehidupan bermasyarakat atau proses demokrasi.

Pasca reformasi 1998, sistem demokrasi di Indonesia mengalami transformasi signifikan, yang diwujudkan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang lebih bebas dan transparan.² Meskipun ada kemajuan, banyak tantangan yang muncul seperti adanya korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan ketidakadilan sosial.³ Kondisi demokrasi Indonesia yang demikian, menunjukkan bahwa sistem yang dianut masih bersifat parsial, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, sebagaimana yang diharapkan dalam UUD 1945.

Berbagai kritik telah dilontarkan terhadap sistem demokrasi di Indonesia, baik dari kalangan akademisi, aktivis, maupun pemikir politik. Salah satu kritik yang menarik untuk dikaji adalah perspektif teologi politik Jurgen Moltmann, bagaimana ia tumbuh dan hidup di Jerman selama Perang Dunia II, yang meninggalkan dampak psikologis dan sosial sungguh berkesan dan mempengaruhi pola hidup J. Moltmann. Pengalaman ini membentuk pandangannya tentang kekuatan, kekerasan, dan penderitaan manusia yang pada akhirnya membentuk kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan tanggung jawab moral dalam masyarakat. Melalui teologinya, Moltmann kemudian mengubah wajah gereja. Dalam hal ini, teologi tidak hanya memperbincangkan persoalan internal gereja, tetapi bergulat dalam persoalan yang berkaitan dengan hal-hal di luar gereja, seperti masalah sosial, politik, dan budaya. Teologi yang bersifat publik menjadikan dunia sebagai "obyek" berteologi, sehingga masalah-masalah yang terjadi di dunia dianggap sebagai permasalahan yang harus ditanggapi secara serius.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif studi kepustakaan untuk mengeksplorasi hubungan antara teologi, sistem demokrasi, dan politik di Indonesia dari perspektif teologi politik Carl Scmitt. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam interaksi kompleks antara nilai-nilai teologis dan praktik politik yang ada di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Demokrasi Indonesia

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara menganut sistem demokrasi atau kedaulatan dan kekuasaan penuh ada di tangan rakyat, sehingga pemegang kekuasaan

²Arif Wijaya, "Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 01 (2014): 138.

³David Eko and Firman Panjaitan, "Titik Temu Pancasila Dan Etika Politik Gereja Dalam Melawan Radikalisme Di Indonesia Combating Radicalism in Indonesia" 07, no. 01 (2021): 43–55.

atau pemimpin harus menyadari bahwa kedaulatan sesungguhnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁴

Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani: *demos* dan *cratos* atau *cratein*. *Demos* yang berarti rakyat yang tinggal di suatu tempat (wilayah), *cratos* atau *cratein* artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti rakyat yang berkuasa; atau bentuk suatu pemerintahan yang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat (*government or rule by the people*).⁵ Suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi apabila memenuhi berbagai aspek demokrasi, yaitu: pertama, menerapkan prinsip negara hukum; kedua, adanya kontrol masyarakat terhadap pemerintah; ketiga, pelaksanaan pemilihan umum yang bebas; keempat, penerapan prinsip mayoritas; dan kelima, adanya perlindungan terhadap hak-hak demokratis.⁶ Demokrasi tidak bisa ditegakkan tanpa adanya kedaulatan hukum, kebebasan berpikir dan berpendapat, persamaan hak bagi semua warga negara dimuka hukum dan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, kedaulatan hukum adalah komponen yang harus ada dalam proses demokratisasi.

Demokrasi Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan zaman. Namun, sejak terjadinya krisis ekonomi dan politik pada akhir tahun 1990-an memicu gerakan reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam sistem demokrasi Indonesia. Pada tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri, membuka jalan bagi transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka, sehingga Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila.⁷ Demokrasi pada masa ini memiliki karakteristik pemilu yang lebih demokratis, perputaran kekuasaan terjadi secara menyeluruh dari pemerintah pusat hingga daerah. Sebagian besar hak warga negara dijamin oleh pemerintah, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan lain-lain.

Seiring berjalannya waktu, menurut beberapa pengamat politik, bahwa Indonesia mengalami kemunduran sistem demokrasi, sebagaimana dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Savira Nafa Alwa, seorang mahasiswi Universitas Padjadjaran, menyatakan bahwa ada penghujung periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi pada tahun 2019, demokrasi di Indonesia dinilai berada pada titik terlemah sejak berakhirnya era Orde Baru. Hal ini tercermin dari pengaruh pemerintah pusat yang semakin dominan, seperti terlihat dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menghilangkan kewenangan daerah dalam proses perizinan usaha dan penilaian dampak lingkungan. Peraturan tersebut juga memberikan wewenang penuh kepada pemerintah pusat untuk mengatur pemesanan, penghentian, dan pemindahan birokrat di berbagai tingkat administrasi negara. Di sisi lain, kepemilikan media di Indonesia dikuasai oleh kelompok elit bisnis-politik yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah, menciptakan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 58.

⁵ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2017), 173.

⁶ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 58.

⁷ Cora Elly Noviati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 337.

ketimpangan dalam penyebaran informasi. Supremasi hukum semakin tergerus oleh pelemahan KPK serta politisasi penanganan kasus pidana. Selain itu, tindakan represif sering digunakan untuk membatasi kritik dan membungkam kebebasan berpendapat di masyarakat.⁸

Selain kondisi demokrasi Indonesia yang semakin menurun dalam uraian di atas, menurut pendapat lainnya bahwa dalam sistem pemerintahan yang sampai hari ini, berbagai oknum yang terjerat kasus korupsi, melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan ketidakadilan sosial,⁹ yang hingga kini sangat mencederai sistem demokrasi Pancasila karena faktor kepentingan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab melalui proses politisasi dan legitimasi kekuasaan. Oleh sebab itu, dalam kondisi demikian, dibutuhkan suatu upaya atau kritik terhadap sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia di zaman ini, sehingga sistem pemerintahan demokrasi yang dijadikan sebagai asas fundamental dalam melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia kembali pada jalur yang ideal sebagaimana dalam cita-cita luhur Undang-Undang Dasar 1945.

Teologi Politik

Teologi politik merupakan sebuah topik yang berkembang sekitar tahun 1922-an, ketika Schmitt membawa konsep teologi politik ke dalam diskusi-diskusi modern melalui sebuah karyanya yang berjudul *“Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty.”*¹⁰

Teologi politik yang dipelopori oleh Carl Schmitt ini merupakan sebuah kritik tajam dan kontroversi terhadap “normativisme liberal” yaitu, asumsi bahwa suatu negara pada akhirnya dapat bersandar pada seperangkat prosedur dan aturan yang disetujui bersama yang mengalihkan klaim dan kebutuhan tertentu. Dengan demikian, pluralisme bukanlah suatu kondisi yang menjadi dasar politik, atau negara dapat didirikan. Sebaliknya Schmitt menyatakan bahwa konsep politik tidak hanya bergantung pada aturan dan norma yang kaku, tetapi lebih berpusat pada keputusan berdaulat, terutama dalam situasi krisis atau keadaan darurat, meskipun harus mengabaikan atas norma ataupun hukum demi kesejahteraan orang banyak.¹¹

Teologi politik yang digagas oleh Schmitt pada dasarnya bukan semata-mata berbicara mengenai teologi, tetapi lebih kepada filsafat politik. Sehingga teologi politik dari Schmitt lebih sering dipahami sebagai sosiologi dari dalam perspektif hukum,

⁸ Savira Nafa Alwa Bahasoan, “Apa Kabar Demokrasi Indonesia?,” *BEM Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, last modified 2021, accessed December 28, 2024, <https://kema.unpad.ac.id/apa-kabar-demokrasi-indonesia/>.

⁹Eko and Panjaitan, “Titik Temu Pancasila Dan Etika Politik Gereja Dalam Melawan Radikalisme Di Indonesia Combating Radicalism in Indonesia.”

¹⁰ Carl Schmitt, *Political Theology*, ed. George Schwab (London: The University of Chicago Press, 2005), xi.

¹¹ Ibid., xvi.

karena itu dalam orientasinya lebih sekadar teori-teori dalam berpolitik.¹² Jadi, teologi politik bertujuan untuk memahami bagaimana negara beroperasi dalam menghadapi ketegangan antara hukum dan politik.

Teologi Politik Baru

Salah satu teolog yang memberi perhatian pada persoalan politik Eropa, ialah Jurgen Moltmann. Lahir pada tahun 1926 di Hamburg, Jerman dari seorang ayah penganut teologi liberal. Ia tumbuh dengan dikelilingi oleh pengaruh G.E. Kurang, J.W. Goethe, dan F. Nietzsche. Dalam teologi kontemporer, Jurgen Moltmann dikenal sebagai pemikir terkemuka di bidang teologi pengharapan, teologi akhir zaman, teologi dialektika, teologi pembebasan, teologi salib, dan teologi Allah Tritunggal.¹³

Menurut Nerti Lubis dalam sebuah tulisannya, menyatakan bahwa sesungguhnya gagasan tentang teologi pengharapan oleh Jurgen Mollman merupakan gambaran tentang teologi politik. Dalam hal ini teologi dijadikan sebagai suatu sistem yang mengatur seluruh hubungan timbal balik antara manusia dan alam semesta, sehingga orang-orang Kristen harus terlibat dalam setiap isu-isu politik ataupun isu sosial sebagai ladang berteologi yang bukan hanya di dalam gereja saja. Teologi politik sebagai teologi kritis atau sebagai teologi yang mengarahkan pada pandangan ke dunia untuk berkomitmen pada keadilan, perdamaian, dan integritas.¹⁴ Jadi, teologi politik bukan sebagai wadah atau strategi untuk memperoleh kekuasaan atau jabatan, melainkan teologi menjawab proses politik di mana di dalamnya nilai-nilai Kristen terejawantahkan.

Terdapat dugaan bahwa, teologi politik yang dipahami oleh Moltmann sering kali disebut dengan istilah “Teologi Politik Baru” dengan membaca teologi secara politisi sebagai bentuk kritik terhadap praktik politik yang terjadi pada masa itu khususnya pada peristiwa *Auschwitz* yang dilakukan oleh Nazi.¹⁵ *Auschwitz* adalah sebagai gerakan yang dipelopori oleh Nazi yang menjadi simbol dari kekejaman dan pembunuhan massal terhadap jutaan orang, terutama Yahudi, selama *Holocaust*. Dalam konteks ini, *Auschwitz* bisa dipandang sebagai degradasi moral umat manusia karena menampilkan bagaimana kebencian, ketidakadilan, dan kekerasan bisa merenggut hak asasi manusia tanpa belas kasihan.¹⁶ Jadi, teologi politik baru merupakan sebuah upaya dalam mengintervensi atau menggugat sistem politik yang ada secara teologis, secara khusus membawa nuansa baru yang mencerminkan nilai-nilai iman Kristen yang menjunjung tinggi keseimbangan

¹² Yunus Septian Harefa, “Studi Tentang Konsep Eklesiologi Dalam Teologi Politik Jürgen Moltmann” (Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, 2016), 10.

¹³J. Grenz Stanley and Roger E. Olson, *Twentieth Century Theology: God & the World in a Transitional Age* (USA: Downers Groove: InterVarsity, 1992), 173.

¹⁴ Febri Ando Pratama Saragih and Nerti Lubis, “Jürgen Moltmann’s Trinity Doctrine as a Political Model for Christians in Indonesia,” *SCRIPTA: Jurnal Teologi & Pelayanan Kontekstual* 18, no. 2 (2024): 110.

¹⁵ Johan Baptist Metz, *Theology in the New Paradigm: Political Theology*, ed. William T. Cavanaugh, Jeffrey W. Bailey, and Craig Hovey (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2012), 316.

¹⁶ Jürgen Moltmann, *God for a Secular Society: The Public Relevance of Theology*, ed. Margaret Kohl (London: SCM Press, 1999), 49.

antara iman dan perbuatan. Dengan kata lain, bahwa pengalaman hidup Moltmann yang harus ada dalam bayang-bayang di mana gereja sebagai wakil Allah di dunia harus terkungkung bahkan harus a[tis dan menutup diri terhadap realitas politik yang begitu kejam pada saat itu.

Menurut Moltmann, ada dua faktor yang menyebabkan gereja berdiam diri dan tidak peduli. Pertama, pandangan umum di kalangan umat Kristen yang menganggap agama sebagai urusan pribadi, sehingga dianggap tidak relevan dengan politik. Kedua, pemahaman dalam menafsirkan doktrin Lutheran tentang Dua Kerajaan. Doktrin ini dipahami sebagai pemberian untuk memisahkan agama dari urusan negara, sehingga gereja dianggap tidak perlu terlibat dalam politik. Faktor kedua ini menciptakan keterpisahan yang tajam antara gereja dan negara, yang pada akhirnya menghasilkan sikap tidak peduli terhadap kondisi sosial.¹⁷

Praksis Teologi Politik Jurgen Moltmann

Pada penjelasan sebelumnya diuraikan tentang teologi politik baru dari perspektif Jurgen Moltmann. Berdasarkan penjabaran di atas, praksis teologi politik Jurgen Moltmann dapat dicerutukan ke dalam empat bagian utama yaitu:

Pertama adalah teologi sosialis. Dalam tulisannya yang berjudul *God in Revolution*, Moltmann menjelaskan bahwa teologi sosialis fokus pada revolusi sosial, yang bertujuan untuk mengubah sistem ekonomi, politik, moral, dan agama. Revolusi ini membuka peluang baru untuk masa depan. Revolusi sosial adalah bagian dari tanggung jawab manusia terhadap keinginan hidup di masa depan. Oleh karena itu, salah satu langkah konkret yang dapat diambil oleh gereja adalah berani dengan mengkritisi sistem-sistem yang tidak manusiawi, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, sebagai bagian dari upaya mewujudkan hadirnya Kerajaan Allah di dunia.¹⁸

Kedua, teologi perdamaian. Menurut Moltmann, teologi ini fokus pada penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan tindakan kriminal. Sebagai langkah konkret, gereja diharapkan mengambil sikap tegas dalam menolak kekerasan dan perang, serta mengutamakan perdamaian sebagai wujud nyata kehadiran *shalom* di dunia.¹⁹

Ketiga, teologi lingkungan hidup. Teologi ini pentingnya tanggung jawab manusia dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Pendekatan ini mengajak gereja untuk berperan aktif dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan mempromosikan kesadaran ekologis sebagai wujud penghormatan terhadap kehendak Tuhan atas kelestarian ciptaan-Nya.²⁰

Perjuangan hak asasi manusia merupakan bagian penting dari teologi yang lahir sebagai respon terhadap rezim diktator yang menindas dan merampas hak-hak warga

¹⁷ Ibid, 50.

¹⁸ Harefa, "Studi Tentang Konsep Eklesiologi Dalam Teologi Politik Jürgen Moltmann," 35.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

negara, seperti yang terjadi di Amerika Latin dan negara-negara Eropa Timur. Menurut Moltmann, upaya membela hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk praktik dalam Teologi Politik. Dalam karyanya *On Human Dignity*, Moltmann menegaskan bahwa perjuangan ini harus berlanjut, karena semua manusia sama mulianya yang menyandang gambaran Allah.²¹ Teologi Politik tidak dimaksudkan untuk meleburkan iman Kristen ke dalam humanisme semata, tetapi untuk menegaskan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Manusia tidak diciptakan untuk ditindas atau direndahkan oleh pihak mana pun, melainkan untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu, setiap orang Kristen diajak untuk tidak memberikan pesan pasif ketika hak asasi manusia lainnya dilanggar. Sebaliknya, mereka ter dorong untuk aktif memperjuangkan keadilan bagi sesamanya sebagai bentuk nyata dari iman yang dimiliki.

Bagaimana Teologi Politik Jurgen Moltmann dapat Digunakan Untuk Mengkritik Sistem Politik ?

Teologi dapat digunakan untuk mengkritik sistem politik di Indonesia, terutama ketika tokoh agama terlibat dalam politik praktis, dengan cara memberikan pandangan moral yang mendasar dan menilai tindakan politik melalui lensa nilai-nilai agama.²² Tokoh agama sering kali memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik dan dapat menggunakan ajaran teologis untuk menyoroti ketidakadilan sosial, korupsi, atau kebijakan yang merugikan masyarakat.

Misalnya, ajaran tentang keadilan dan kepedulian terhadap yang lemah dari Alkitab, seperti dalam Matius 25:40 yang menyatakan, "Sesungguhnya, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk Aku," dapat digunakan oleh tokoh agama untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih adil dan humanis. Ketika tokoh agama terjun ke dalam politik praktis, mereka sering kali memanfaatkan nilai-nilai ini untuk mengecam kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat atau diskriminatif.²³

Di Indonesia, keterlibatan tokoh agama dalam politik bisa menjadi kontroversial. Di satu sisi, mereka dapat berkontribusi positif dengan membawa suara masyarakat ke dalam forum politik; di sisi lain, mereka juga dapat memunculkan ketegangan jika interpretasi ajaran agama digunakan untuk membenarkan tindakan atau kebijakan yang merugikan kelompok lain. Oleh karena itu, penting bagi tokoh agama untuk tetap berpegang pada nilai-nilai teologis yang mendorong keadilan, kesetaraan, dan perdamaian.

²¹ Ibid.

²²A Suharto, "Kepemimpinan Kristen Dan Pembangunan Sosial: Perspektif Dan Praktik Di Toraja" (Yogyakarta: Penerbit Alfabeta, 2017).

²³Ibid.

Kritik Terhadap Tokoh Agama yang Terlibat dalam Politik Praktis

Perhelatan demokrasi dan politik di Indonesia saat ini melibatkan seluruh kalangan salah satunya organisasi agama. Keikutsertaan tokoh agama dalam politik praktis membawa dampak yang kompleks. Meskipun ada potensi untuk memperkuat nilai-nilai moral dan mempromosikan keadilan, ada juga risiko yang signifikan terkait dengan polarisasi dan hilangnya otoritas spiritual. Oleh karena itu, penting bagi tokoh agama untuk menjaga integritas mereka dan berupaya untuk berkontribusi secara positif dalam politik tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar ajaran mereka. Namun yang menjadi persoalan adalah Tokoh agama cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Banyak tokoh agama terlibat langsung dalam politik kotor, misalnya pasangan calon yang didukung oleh tokoh agama terlibat dalam many politik. Tentu tokoh agama yang mendukung pasangan calon tersebut terlibat dalam many politik. Pemuka agama yang terlibat dalam politik praktis sering kali menggunakan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama untuk memenangkan pasangan calon yang didukung. Hal demikian yang menjadi persoalan dalam masyarakat. Masyarakat kemudian mempertanyakan tugas dan tanggung jawab daripada para pemuka agama.²⁴

Tokoh agama yang terlibat dalam politik mendapatkan banyak kritik dari masyarakat dengan alasan bahwa seharusnya agama terpisah dari politik. Keterlibatan tokoh agama dalam politik sering kali menunjukkan bahwa campur tangan agama dalam politik menimbulkan kontroversi. Masyarakat sering kali mencurigai bahwa tokoh agama yang terlibat dalam politik mungkin memiliki agenda pribadi. Kekhawatiran akan kepentingan pribadi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama. Tokoh agama yang terlibat dalam politik dianggap tidak lagi dapat memberikan bimbingan moral yang objektif kepada masyarakat serta keterlibatan dalam politik dapat mengaburkan pandangan moral etik tokoh agama.

Campur tangan tokoh agama dalam politik dapat memperkuat politik identitas, di mana kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau terdiskriminasi. Tokoh agama yang terlibat dalam politik praktis bisa merusak citra dan otoritas moral tokoh agama. Masyarakat akan mulai meragukan niat dan integritas mereka. Kehadiran tokoh agama di arena politik dapat memperdalam polarisasi dalam masyarakat, terutama jika mereka berpihak pada satu kelompok tertentu. Kemudian akan ada risiko bahwa ajaran agama bisa disalahgunakan untuk membenarkan tindakan politik tertentu, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar agama itu sendiri. Hal demikian tidak dapat disangkal bahwa situasi politik saat ini telah menjerusmuskan sebagian besar tokoh agama dalam politik praktis.

Tokoh agama harus sadar bahwa kehadiran mereka dalam pesta demokrasi dan politik seharusnya membawa ajaran agama. Sehingga perjalanan demokrasi dan politik

²⁴Erman S.Saragih, "Penatalayanan Gereja Dalam Politik Praktis" (n.d.): 1-11.

di Indonesia sesuai dengan aturan dan ajaran agama. Beberapa tugas tokoh agama dalam menjaga kestabilan politik sebagai berikut:

Pertama, memberikan bimbingan moral dan etika. Tokoh agama berperan penting dalam memberikan arahan moral kepada masyarakat, termasuk dalam konteks politik. Mereka diharapkan dapat menyampaikan nilai-nilai agama yang dapat memperkuat integritas dan etika dalam praktik politik.²⁵

Kedua, mendorong partisipasi aktif. Tokoh agama sering kali menjadi penggerak untuk mendorong masyarakat, terutama jemaat, untuk aktif dalam proses demokrasi. Ini mencakup partisipasi dalam pemilihan umum, forum diskusi, dan kegiatan politik lainnya yang mendukung keadilan sosial.

Ketiga, menjadi mediator dalam konflik. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, tokoh agama dapat berfungsi sebagai mediator dalam konflik sosial atau politik. Mereka dapat membantu menyelesaikan perbedaan pandangan dengan pendekatan yang berlandaskan pada ajaran agama.

Keempat, menjaga keberagaman dan toleransi. Tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan toleransi antaragama dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Hal ini penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang inklusif dan harmonis.²⁶

Kelima, menyuarakan keadilan sosial. Tokoh agama sering kali mengadvokasi isu-isu keadilan sosial, termasuk hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Mereka dapat mengingatkan pemerintah tentang tanggung jawabnya terhadap rakyat, sesuai dengan ajaran agama yang mendorong keadilan dan kasih sayang.

Keenam, mengawasi kebijakan publik. Tokoh agama dapat berperan dalam mengawasi kebijakan publik untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat. Mereka bisa memberikan kritik dan saran konstruktif terhadap pemerintah. Jadi, masyarakat mengharapkan tokoh agama yang terlibat dalam politik menjadi teladan moral dan membela serta memperjuangkan masyarakat apabila ada keputusan politik yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Kritik Teologi Terhadap Koalisi Partai

Kritik teologi terhadap koalisi partai yang dibentuk untuk kepentingan kelompok tertentu sering kali berfokus pada beberapa aspek, seperti integritas moral, keadilan sosial, dan komitmen terhadap nilai-nilai agama.

Kritik ini muncul dari pandangan bahwa koalisi yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan politik dan kekuasaan dapat mengorbankan integritas moral. Dalam konteks teologi, tindakan politik seharusnya mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh agama.²⁷ Koalisi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu

²⁵Otto Gusti Madung, *Politik:Antara Legalitas Dan Moralitas* (Ladalero, 2009).

²⁶Ahmad Khoirul Fata, "Dirkursus Dan Kritik Terhadap Teologi Pluralisme Agama Di Indonesia," *Miqot* XLII, no. 1 (2018): 105-128.

²⁷Yonatan Alex Arifianto Fereddy, "Etika Kristen Di Tengah Dinamika Politik Praktis: Merevitalisasi Nilai-Nilai Agama Dalam Praktik Politik Kontemporer" 5, no. 1 (2023): 77-85.

dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip moral. Alkitab mengajarkan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan. Dalam Amos 5:24, dikatakan, "Tetapi biarlah keadilan mengalir seperti air, dan kebenaran seperti aliran yang tidak pernah kering." Koalisi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu sering kali mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya melayani semua orang.

Dari perspektif teologi, keadilan sosial menjadi dasar penting dalam politik.²⁸ Koalisi yang berfokus pada kepentingan kelompok tertentu dapat mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Dalam pandangan teologis, tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan keadilan dan kepedulian terhadap sesama. Alkitab mengajarkan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan. Dalam Amos 5:24, dikatakan, "Tetapi biarlah keadilan mengalir seperti air, dan kebenaran seperti aliran yang tidak pernah kering." Koalisi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu sering kali mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya melayani semua orang.

Kritik teologis juga menyoroti pemisahan antara kekuasaan politik dan spiritualitas. Ketika partai-partai politik berkoalisi untuk keuntungan pragmatis, mereka dapat kehilangan visi spiritual dan tujuan moral yang seharusnya menjadi pemandu dalam pengambilan keputusan politik. Dalam Markus 10:42-45, Yesus mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melayani.²⁹ Koalisi yang dibentuk untuk kepentingan kelompok tertentu dapat dilihat sebagai penyelewengan dari panggilan untuk melayani semua orang, terutama yang terpinggirkan.

Koalisi yang dibentuk hanya untuk kepentingan kelompok tertentu sering kali mengabaikan nilai-nilai universal yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks teologis, hal ini dapat dianggap sebagai penyelewengan dari ajaran agama yang mendorong persatuan dan saling menghormati. Korintus 12:12-27 menggambarkan bahwa tubuh Kristus terdiri dari berbagai anggota yang berbeda tetapi saling melengkapi. Koalisi yang bersifat eksklusif dan mementingkan satu kelompok dapat menciptakan perpecahan, bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang persatuan dalam keragaman.

Rekomendasi untuk Integrasi Teologi dan Politik

Integrasi teologi dan politik berakar pada pemahaman bahwa iman Kristen tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek politik. Dalam Matius 5:13-16, umat Kristen diajak untuk menjadi garam dan terang dunia, yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan politik.³⁰ Teologi Kristen menekankan pentingnya keadilan dan kepedulian terhadap yang lemah. Dalam konteks politik, integrasi ini mendorong

²⁸H D Sianipar and P Eunike, "Perspektif Etika Politik Kristen Tentang Hubungan Gereja Dan Negara," *Journal of Religious and Socio-Cultural* 1, no. 1 (2020): 33-46.

²⁹ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Penuntun Berkelimpahan* (Malang: Gandum Mas, 2019).

³⁰Sirait Saut Hamongan, *Politik Kristen Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006).

pemimpin untuk mengutamakan kebijakan yang berpihak pada kaum marginal dan memperjuangkan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan ajaran Yesus yang mengutuk penindasan dan ketidakadilan. Gereja berperan sebagai suara moral dalam masyarakat.³¹ Melalui pengajaran dan tindakan, gereja dapat mempengaruhi kebijakan publik dan membentuk opini masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Pemuka agama dapat terlibat dalam dialog dan kolaborasi dengan politisi untuk mendorong kebijakan yang adil.³² Integrasi teologi dan politik juga mengingatkan para pemimpin untuk tetap berpegang pada nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan politik.³³ Hal ini penting untuk menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang seringkali terjadi dalam politik.

Integrasi ini berfokus pada bagaimana ajaran agama dapat membimbing pemikiran dan tindakan politik. Teologi memberikan dasar moral dan etika dalam pengambilan keputusan politik, sementara politik menyediakan ruang untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat.³⁴ Banyak ajaran agama menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Dalam konteks politik, pemimpin yang mengintegrasikan teologi dalam kebijakan publik akan lebih sensitif terhadap isu-isu sosial dan dapat mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Pemuka agama memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog antara nilai-nilai teologis dan praktik politik. Mereka dapat berkontribusi dengan memberikan perspektif moral yang dapat membantu mendorong kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Di tengah tantangan global, seperti konflik sosial dan ketidakadilan, integrasi teologi dan politik dapat menjadi solusi untuk menciptakan perdamaian. Ajaran agama yang mendukung persatuan dan kerukunan dapat menginspirasi tindakan politik yang positif.³⁵

4. Kesimpulan

Demokrasi di Indonesia pasca reformasi mengalami pasang surut. Meskipun awalnya membawa angin segar dengan pemilu yang lebih bebas dan transparan, tantangan seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan sosial masih terus membayangi. Bahkan, beberapa pengamat menilai bahwa kualitas demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, ditandai dengan dominasi pemerintah pusat, ketimpangan informasi, dan pelemahan supremasi hukum. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan kritik terhadap sistem demokrasi yang berjalan, agar kembali pada cita-cita luhur UUD 1945.

³¹Eko and Panjaitan, "Titik Temu Pancasila Dan Etika Politik Gereja Dalam Melawan Radikalisme Di Indonesia Combating Radicalism in Indonesia."

³²Fereddy, "Etika Kristen Di Tengah Dinamika Politik Praktis : Merevitalisasi Nilai-Nilai Agama Dalam Praktik Politik Kontemporer."

³³Mateus Mali CSSR, *Konsep Berpolitik Orang Kristiani* (Yogyakarta: Kansinus, 2014).

³⁴Paulus Budi Kleden, "Teologi Terlibat: Politik Dan Budaya Dalam Terang Teologi" (Ledalero, 2003), 236.

³⁵Mahdi Fadullah, ed., *Titik Temu Agama Dan Politik Sayyid Qutb* (Solo: Ramadhani, 1991).

Dalam kondisi demokrasi Indonesia yang demikian, teologi politik baru perspektif Jurgen Moltmann, menjadi lensa kritis untuk melihat dan mengevaluasi sistem politik yang ada. Teologi politik Moltmann, yang lahir dari pengalaman pahit Perang Dunia II, menekankan pentingnya keterlibatan gereja dalam isu-isu sosial dan politik. Ia mengkritik gereja yang pasif dan hanya berfokus pada persoalan internal, sementara mengabaikan realitas ketidakadilan dan penderitaan di dunia. Melalui konsep "Teologi Politik Baru," Moltmann mendorong gereja untuk mengintervensi sistem politik yang ada secara teologis, membawa nilai-nilai iman Kristen seperti keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ke dalam ranah publik. Praksis teologi politik Moltmann mencakup teologi sosialis, teologi pendamaian, teologi lingkungan hidup, dan perjuangan hak asasi manusia, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan Kerajaan Allah di dunia.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bahasoan, Savira Nafa Alwa. "Apa Kabar Demokrasi Indonesia?" *BEM Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*. Last modified 2021. Accessed December 28, 2024. <https://kema.unpad.ac.id/apa-kabar-demokrasi-indonesia/>.
- CSR, Mateus Mali. *Konsep Berpolitik Orang Kristiani*. Yogyakarta: PT Kansinus, 2014.
- Eko, David, and Firman Panjaitan. "Titik Temu Pancasila Dan Etika Politik Gereja Dalam Melawan Radikalisme Di Indonesia Combating Radicalism in Indonesia" 07, no. 01 (2021): 43–55.
- Erman S. Saragih, "Penatalayanan Gereja Dalam Politik Praktis" (n.d.): 1–11.
- Fadullah, Mahdi, ed. *Titik Temu Agama Dan Politik Sayyid Qutb*. Solo: Ramadhani, 1991.
- Fata, Ahmad Khoirul. "Dirkursus Dan Kritik Terhadap Teologi Pluralisme Agama Di Indonesia." *Miqot* XLII, no. 1 (2018): 105–128.
- Fereddy, Yonatan Alex Arifianto. "Etika Kristen Di Tengah Dinamika Politik Praktis : Merevitalisasi Nilai-Nilai Agama Dalam Praktik Politik Kontemporer" 5, no. 1 (2023): 77–85.
- Hamonangan, Sirait Saut. *Politik Kristen Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Harefa, Yunus Septifan. "Studi Tentang Konsep Eklesiologi Dalam Teologi Politik Jürgen Moltmann." Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, 2016.
- Kleden, Paulus Budi. "Teologi Terlibat: Politik Dan Budaya Dalam Terang Teologi." 236. Ledalero, 2003.
- Lembaga Alkitab Indonesia. *Alkitab Penuntun Berkelimpahan*. Malang: Gandum Mas, 2019.
- Madung, Otto Gusti. *Politik:Antara Legalitas Dan Moralitas*. Ledalero, 2009.
- Metz, Johan Baptist. *Theology in the New Paradigm: Political Theology*. Edited by William T. Cavanaugh, Jeffrey W. Bailey, and Craig Hovey. Grand Rapids: William B.

- Eerdmans Publishing Company, 2012.
- Moltmann, Jürgen. *God for a Secular Society: The Public Relevance of Theology*. Edited by Margaret Kohl. London: SCM Press, 1999.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333–354.
- Saragih, Febri Ando Pratama, and Nerti Lubis. "Jürgen Moltmann's Trinity Doctrine as a Political Model for Christians in Indonesia." *SCRIPTA: Jurnal Teologi & Pelayanan Kontekstual* 18, no. 2 (2024): 105–119.
- Schmitt, Carl. *Political Theology*. Edited by George Schwab. London: The University of Chicago Press, 2005.
- Setiawan, Hendra. "Negara Ideal Menurut John Stuart Mill Dan Relevansinya Dalam Politik Indonesia Kontemporer." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2024.
- Sianipar, H D, and P Eunike. "Perspektif Etika Politik Kristen Tentang Hubungan Gereja Dan Negara." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 1, no. 1 (2020): 33–46.
- Stanley, J. Grenz, and Roger E. Olson. *Twentieth Century Theology: God & the World in a Transitional Age*. USA: Downers Groove: InterVarsity, 1992.
- Suharto, A. "Kepemimpinan Kristen Dan Pembagunan Sosial: Perspektif Dan Praktik Di Toraja." Yogyakarta: Penerbit Alfabet, 2017.
- Suseno, Frans Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosois*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Wijaya, Arif. "Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundungan Islam* 4, no. 01 (2014): 136–158.